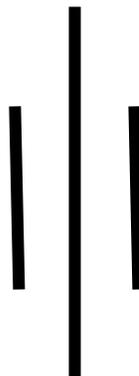




**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG**

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA ( RENJA )  
TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
TAHUN 2021**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2021, merupakan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja ) Perangkat Daerah sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini menjadi Rencana Kerja (Renja ) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, Dokumen ini memuat tentang Evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021, rencana program,kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran perangkat kerja sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Perubahan Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Muaro Sijunjung, Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

JAHERI, S.Sos,M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19730311 199303 1 004



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020 .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II Tahun 2020 .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMPTS . .....	14
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMPTSP .....	17
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD .....	17
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ...	26
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMPTSP.....	23
3.3. Program dan Kegiatan .....	28
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	32
V. PENUTUP .....	40

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2021 yang telah ditetapkan. Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan surat Bupati Sijunjung Nomor 050/233/Bappeda-2021 tanggal 9 Juli 2021 Perihal Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung, antara lain :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.
2. Penyesuaian Recofusing dan realokasi anggaran Program /Kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan, pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam rangka mencapai target RPJMD 2016 – 2021.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dilakukan dengan melandaskan pada sejumlah aturan perundangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;

5. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Undang- undang RI nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Ditetapkannya Pandemi covid- 19 sebagai Bencana Nasional non alam;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
20. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Naskah Perubahan RENJA merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2021. Oleh karena itu maksud disusunnya Perubahan RENJA Tahun 2021 adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.
2. Diharapkan mampu mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pengembangan Penanaman Modal yang ditetapkan.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
2. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulan, Tahunan serta LAKIP dan masukan bagi penyusunan LPJ Bupati Kabupaten Sijunjung.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan I Sampai Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN BERJALAN

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I SAMPAI TRIWULAN II

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman Modal. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan melalui 6 program dan 13 kegiatan, 31 Sub Kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan urusan penanaman modal adalah sebesar Rp. 4.740.612.815 , yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.636.902.975,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 103.709.840,-.

Akibat adanya Pandemi Corona-19, terjadi Recofusing yang mempengaruhi terhadap pergeseran dan perubahan anggaran, sampai dengan Triwulan II Anggaran DPMPTSP menjadi Rp. 4.534.691.837,- yang terdiri dari yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.493.999.117,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 40.692.720,-.

Tabel 2.1.1  
Anggaran dan Realisasi per jenis belanja sampai dengan  
Triwulan II  
Tahun Anggran 2021

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasional	4.493.999.117,-	1.887.194.858,-	41,99
2	Belanja Modal	40.692.720,-	30.518.800,-	74,99
	Jumlah 1+2	4.534.691.837,-	1.917.713.658,-	42,29

Tabel 2.1.2  
 Anggaran dan Realisasi per Sub Kegiatan sampai dengan  
 Triwulan II  
 Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
	<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	3.439.500.417	1.570.478.024	45,66
	<b>1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	67.200.550	29.187.000	43,43
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.355.750	24.007.000	40,45
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.844.800	5.180.000	66,03
	<b>2. Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2.718.359.187	1.217.271.834	44,78
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.660.442.687	1.188.612.646	44,68
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	32.550.200	14.093.088	43,30
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.366.300	14.566.100	57,42
	<b>3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	42.546.250	26.385.000	62,01
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25.628.000	23.973.500	93,54
7	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.932.250	2.411.500	27,00
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7.986.000	-	0,00
	<b>4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	119.490.020	52.180.438	43,67
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.425.400	3.959.400	72,98
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16.404.670	6.145.750	37,46
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.450.400	5.478.300	57,97
12	Penyediaan bahan logistik kantor	9.987.100	5.740.700	57,48

13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.420.300	7.198.800	69,08
14	Fasilitasi Kunjungan tamu	8.389.900	5.419.900	64,60
15	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	59.412.250	18.237.588	30,70
	<b>5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	26.112.800	25.513.550	97,71
16	Pengadaan Mebel	26.112.800	25.513.550	97,71
	<b>6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	245.182.110	99.925.211	40,76
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.721.060	42.161.723	41,86
18	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20.168.000	13.440.000	66,64
19	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	124.293.050	44.323.488	35,66
	<b>7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	220.609.500	120.014.991	54,40
20	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	158.313.500	81.789.991	51,66
21	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	62.296.000	38.225.000	61,36
	<b>2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	75.632.800	33.854.229	44,76
	<b>8. Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	33.998.100	12.173.629	35,81
22	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	33.998.100	12.173.629	35,81
	<b>9. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	41.634.700	21.680.600	52,07
23	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	41.634.700	21.680.600	52,07
	<b>3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>217.208.620</b>	<b>44.740.670</b>	<b>20,6</b>
	<b>10. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>217.208.620</b>	<b>44.740.670</b>	<b>20,6</b>

24	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	217.208.620	44.740.670	20,6
	<b>4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	306.381.400	125.201.941	20,6
	<b>11. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	306.381.400	125.201.941	20,6
25	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	234.817.000	103.600.341	44,12
26	Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	2.476.800	2.476.800	100
27	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	69.087.600	19.124.800	27,68
	<b>5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	431.706.400	114.873.238	27,68
	<b>12. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	431.706.400	114.873.238	27,68
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	90.037.300	23.610.829	26,22
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM	210.922.400	58.030.750	27,51
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	130.746.700	33.231.659	25,42
	<b>6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	64.262.200	28.565.556	44,45
	<b>13. Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	64.262.200	28.565.556	44,45
31	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	64.262.200	28.565.556	44,45
	<b>TOTAL</b>	<b>4.534.691.837</b>	<b>1.917.713.658</b>	<b>42,29</b>

Evaluasi pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal dilakukan terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021, mengacu pada APBD tahun 2021. Kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP 2016-2021.

Evaluasi urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Realisasi masing-masing program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :







## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Analisa kinerja pelayanan OPD adalah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditentukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas PMPTSP adalah :

1. Meningkatnya jumlah investor PMDN dan PMA
2. Meningkatnya nilai realisasi Investasi PMDN dan PMA
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP

Adapun capaian kinerja pelayanan urusan Penanaman Modal pada Dinas PMPTSP tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel : 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Sijunjung**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Investor PMDN (perusahaan)		Meningkatnya Jumlah Investor	134	144	154	-	144	167	180	-	
	Jumlah Investor PMA (perusahaan)			10	11	12	-	10	10	10	-	
2	Realisasi Investasi PMDN (Rp.)		Meningkatnya Nilai realisasi Investasi	5.779.875	7.279.875	8.779.875	-	8.097.746	<b>9.021.104</b>	9.424.823	-	
	Realisasi Investasi PMA (US\$)			114.000	152.000	190.000	-	189.937	<b>193.559</b>	<b>193.559</b>	-	
3	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	80,71	82	84	-	83,53	83,53	86,18	-	

Dibandingkan Realisasi capaian Jumlah Investor PMDN tahun 2020, Realisasi Tahun 2021 terjadi kenaikan dari 167 menjadi 180, sedangkan untuk realisasi Capaian Jumlah Investor PMA Tahun 2021 tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini di sebabkan tidak adanya tambahan Perusahaan Asing yang berinvestasi di Kabupaten Sijunjung.

Dibandingkan Realisasi Investasi Tahun 2020, dengan Realisasi tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu dari Rp 9.021.104,- (dalam Juta) naik menjadi Rp. 9.424.823,- (dalam juta).

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja Jumlah Investor PMDN/PMA, Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA adalah sebesar Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian kinerja meningkatnya Ke puasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP melalui pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 306.381.400,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 125.201.941,- (40,86 %).

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan PTSP menggunakan alat bantu berupa kuisioner yang di bagikan kepada masyarakat pengguna layanan perizinan dengan sampel sebanyak 200 responden, adapun pertanyaan meliputi 9 unsur sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / tariff
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil analisis data survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap PTSP dari 9 unsur penilaian 8 unsur berada pada kondisi Baik, 1 unsur berada pada kategori Sangat Baik yaitu unsure sarana dan Prasarana namun demikian dari 9 unsur penilaian masih ada yang perlu di tingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu ketepatan waktu dalam

penerbitan izin sesuai prosedur, peningkatan kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan demi kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengguna layanan yang mengajukan permohonan perizinan.

Jika dibandingkan dengan IKM terhadap pelayanan PTSP tahun 2020, yaitu dengan nilai 83,53 maka pencapaian indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP tahun 2021 cukup tinggi

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas PMPTSP, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya promosi penanaman modal
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- c. Belum optimalnya system informasi pelayanan perizinan
- d. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan LKPM

### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD**

Telaahan terhadap rancangan Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan/ Sub Kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan Perubahan RKPD.

Review terhadap rancangan Perubahan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program,kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan/Sub Kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/ Sub Kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/ Sub Kegiatan.

Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021  
DPMPTSP Kabupaten Sijunjung

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4.534.691.837					4.634.691.837	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Sijunjung	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran ; Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik ; Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	100,100,100,38,0	3.439.500.417	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Sijunjung	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100%	3.502.500.417	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan Evaluasi	100%	67.200.550	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	72.200.550	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 Bulan	59.355.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	3 Dokumen	64.355.750	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 Bulan	<b>7.844.800</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan	4 Dokumen	<b>7.844.800</b>	
	<b>Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>2.718.359.187</b>	<b>Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	<b>2.722.414.187</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sijunjung	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	23 orang	<b>2.660.442.687</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sijunjung	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	24 orang	<b>2.660.442.687</b>	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan pelaksanaan Penata usahaan pengujian/verifikasiSKPD	12 Bulan	<b>32.550.200</b>	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sijunjung	Jumlah dokumen SPP, SPM dan Pengesehan SPJ yang diterbitkan	50 SPP, 50 SPM,2400 SPJ	<b>32.550.200</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	18 Dokumen	<b>25.366.300</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sijunjung	Jumlah laporan Keuangan bulanan/ triwulan/semesteran yang disiapkan	18 laporan	<b>29.421.300</b>	
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Terhadap pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>245.182.110</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<b>100%</b>	<b>260.138.110</b>	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi	12 bulan	<b>100.721.060</b>	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	250 meter kubik	<b>100.721.060</b>	
Jumlah Tagihan listrik yang dibayarkan								33240 Kwh			
Jumlah kapasitas internet yang dibayarkan								50 Mbps			
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	12 bulan	<b>20.168.000</b>	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	65 peralatan, 151 perlengkapan	<b>23.218.000</b>	
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	12 bulan	<b>124.293.050</b>	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	12 orang	<b>136.199.050</b>	

	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Terhadap pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>119.490.020</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>158.479.020</b>	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 bulan	<b>10.420.300</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sijunjung	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (nama barangnya)	40 eks kartu kendali, 10 blok STS, 20 buku lembar disposisi, 50 blok Kwitansi fotocopy 10 rb lembar	<b>15.081.300</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 bulan	<b>5.425.400</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	<b>4 Paket</b>	<b>8.845.400</b>	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 bulan	<b>16.404.670</b>	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	<b>46.404.670</b>	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 bulan	<b>9.450.400</b>	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Sijunjung	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	<b>9.450.400</b>	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 bulan	<b>9.987.100</b>	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	<b>10.895.100</b>	
	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 bulan	<b>8.389.900</b>	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kabupaten Sijunjung	Jumlah tamu yang dilayani	150 orang	<b>8.389.900</b>	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 bulan	<b>59.412.250</b>	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Sijunjung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	10 laporan	<b>59.412.250</b>	
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Terhadap pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>26.112.800</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>26.112.800</b>	
	Pengadaan Mebel				<b>26.112.800</b>	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan	<b>2 paket</b>	<b>26.112.800</b>	

								mebel			
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Terhadap pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>220.609.500</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>220.609.500</b>	
	1). Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	12 bulan	<b>62.296.000</b>	1). Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Kabupaten Sijunjung	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 Unit	<b>62.296.000</b>	
	2). Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	12 bulan	<b>158.313.500</b>	2). Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Kabupaten Sijunjung	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	5 Roda 4, 8 Roda 2	<b>158.313.500</b>	
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>100 Persen</b>	<b>42.546.250</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>42.546.250</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	12 Bulan	<b>25.628.000</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten Sijunjung	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	43 Stel	<b>25.628.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sijunjung		13 Bulan	<b>8.932.250</b>	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	1 orang	<b>8.932.250</b>	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sijunjung	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14 Bulan	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sijunjung	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Kabupaten Sijunjung	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bimtek	43 orang	<b>7.986.000</b>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 Bintek	<b>7.986.000</b>	
2.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Jumlah investor PMDN ; Jumlah investor PMA ; Realisasi investasi PMDN ; Realisasi investasi PMA</b>	<b>167 ; 16 ; 8.779.875 ; 190.000 0</b>	<b>75.632.800</b>	<b>2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Persentase Penurunan Pengaduan Pelaku Usaha</b>	<b>0%</b>	<b>85.632.800</b>	

	<b>Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Jumlah regulasi yang disusun dan disosialisasikan</b>	<b>1 produk hukum</b>	<b>33.998.100</b>	<b>Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	Jumlah regulasi dan dokumen evaluasi yang dilaksanakan	1 Dokumen	<b>35.998.100</b>	
	1). Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Regulasi yang disusun, Jumlah peserta sosialisasi	1 dokumen, 100 orang	<b>33.998.100</b>	1). Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Regulasi yang disusun, Jumlah SOP pelaksanaan pemberian insentif PM	1 Dokumen	<b>35.998.100</b>	
	<b>Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sijunjung	Jumlah buku potensi peluang investasi dan WEB GIS Sektor Potensi Investasi	20 buku potensi	<b>41.634.700</b>	<b>Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sijunjung	Jumlah buku potensi peluang investasi, web gis sektor potensi investasi	1 dokumen	<b>49.634.700</b>	
	1). Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sijunjung	Jumlah buku potensi peluang investasi, web gis sektor potensi investasi	10 buku, 1 web	<b>41.634.700</b>	1). Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sijunjung	Jumlah buku potensi dan peluang investasi, web gis sektor potensi investasi, jumlah feasibility study	0 Dokumen peluang investasi ; 1 updating	<b>49.634.700</b>	
3.	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Jumlah investor PMDN ; Jumlah investor PMA ; Realisasi investasi PMDN ; Realisasi investasi PMA ; Jumlah investor PMDN ; Jumlah investor PMA ; Realisasi investasi PMDN ; Realisasi investasi PMA</b>	<b>167 ; 16 ; 8.779.875 ; 190.000 0</b>	<b>217.208.620</b>	<b>3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha (investasi diatas 1 Milyar)	1 Perusahaan	<b>217.208.620</b>	
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>NKRI</b>	<b>Jumlah even yang diikuti</b>	<b>3 Even</b>	<b>217.208.620</b>	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>NKRI</b>	Jumlah Even yang diikuti Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, Jumlah temu bisnis yang diikuti, jumlah	1 Event, 2 kali koordinasi	<b>217.208.620</b>	

								Vidio Promosi			
	1).Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	NKRI	Jumlah Even yang diikuti, Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 Pameran, 5 Kali	<b>217.208.620</b>	1).Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	NKRI	Jumlah Even yang diikuti Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, Jumlah temu bisnis yang diikuti, jumlah Vidio Promosi	1 Event, 2 kali koordinasi	<b>217.208.620</b>	
4.	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Sijunjung	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP	84,0	<b>306.381.400</b>	<b>4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Sijunjung	Persentase peningkatan penerbitan perizinan penanaman modal yang diterbitkan ; Persentase jenis pelayanan yang memiliki SPP;	4,16%,100%	<b>326.381.400</b>	
	<b>Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sijunjung	Jumlah jenis pelayanan yang diberikan	115 Izin dan non izin	<b>306.381.400</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Izin yang diterbitkan, jumlah media publikasi , Jumlah Laporan dan penyuluhan yang dilaksanakan, Jumlah Dokumen Survey IKM dan Jumlah SPP dan SOP yang disusun, serta jumlah Koordinas dan sinkronisasi yang dilaksanakan serta jumlah konsultasi dan koordinasi Perizinan dan non perizinan	115 izin dan non izin, 12 Laporan, 5 dokumen	<b>326.381.400</b>	

	1). Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Izin yang diterbitkan	1200 Izin dan Non Izin	234.817.000	1). Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Izin yang diterbitkan dan jumlah media publikasi	1200 izin dan non izin	254.817.000	
	2). Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Laporan	12 Laporan	<b>2.476.800</b>	2). Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Kabupaten Sijunjung	Jumlah laporan dan Jumlah Penyuluhan Perizinan berusaha	12 laporan	<b>2.476.800</b>	
	3). Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Survey IKM	2 Dokumen	<b>69.087.600</b>	3). Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Dokumen Survey IKM dan Jumlah SPP dan SOP yang disusun	5 Dokumen	<b>69.087.600</b>	
5.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Jumlah investor PMDN ; Jumlah investor PMA ; Realisasi investasi PMDN ; Realisasi investasi PMA</b>	<b>167; 16; 8.779.875; 190.000 0</b>	<b>431.706.400</b>	<b>5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	Nilai Realisasi Investasi;	<b>67 Milyar</b>	<b>431.706.400</b>	
	<b>Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>Jumlah perusahaan Penanaman modal yang dilakukan pengendalian</b>	<b>90 perusahaan</b>	<b>431.706.400</b>	<b>Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	Jumlah Laporan LKPM, Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan, Jumlah Perusahaan yang dibina serta jumlah konsultasi dan koordinasi Perizinan dan non perizinan	4 dokumen, 75 Perusahaan, 15 Perusahaan, 2 kali	<b>431.706.400</b>	
	1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Pemantauan Laporan LKPM	40 Perusahaan	<b>90.037.300</b>	1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Perusahaan yang dipantau laporan LKPM, Penyusunan buku data	30 Perusahaan, 20 Buku	<b>90.037.300</b>	

							perusahaan			
	2). Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal, Jumlah peserta Bintek dan Sosialisasi	20 Perusahaan	<b>210.922.400</b>	2). Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM	Kabupaten Sijunjung	Jumlah perusahaan yang di bina dan jumlah Bintek/sosialisasi	15 Perusahaan, 6 angkatan	<b>210.922.400</b>
	3). Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Yang Diawasi	90 Perusahaan	<b>130.746.700</b>	3). Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	Kabupaten Sijunjung	Jumlah perusahaan yang diawasi	75 Perusahaan,	<b>130.746.700</b>
6.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Sijunjung	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP</b>	<b>84, 0</b>	<b>64.262.200</b>	<b>6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kabupaten Sijunjung	Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi Penanaman Modal	<b>80</b>	<b>71.262.200</b>
	<b>Kegiatan : Pengeloaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sijunjung	<b>Jumlah media penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola</b>	<b>2 Media</b>	<b>64.262.200</b>	<b>Kegiatan : Pengeloaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sijunjung	Jumlah penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola	<b>2 Media</b>	<b>71.262.200</b>
	1 ) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Media	2 Media	<b>64.262.200</b>	1 ) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Sijunjung	Jumlah penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola	<b>2 Media</b>	<b>71.262.200</b>
					<b>4.534.691.837</b>					<b>4.634.691.837</b>

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas PMPTSP dan juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

Pada penyusunan rancangan Perubahan RENJA DPMPTSP tahun 2021 setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten tidak ada usulan program dan kegiatan yang di usulkan untuk dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sumber dana APBD untuk 2021.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2021**

N o	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	N I H I L				



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Arah kebijakan umum pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
7. Mengembangkan dan meratakan pembangunan daerah

Adapun arah kebijakan nasional di sektor penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing,
- b. Meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas PMPTSP tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis, Adapun Tujuan Renja Dinas PMPTSP yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat dan transparan sesuai dengan prosedur dengan mengutamakan kejujuran dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.

- b. Membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang manfaat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan serta koordinasi antar unit /lembaga yang terkait

Adapun Sasaran yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah Investor dengan indikator
  - Jumlah Investor PMDN
  - Jumlah Investor PMA
2. Meningkatnya nilai realisasi investasi dengan indikator :
  - Realisasi Investasi PMDN
  - Realisasi Investasi PMA
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dengan indikator
  - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas PMPTSP Tahun 2021 tetap mengacu pada Renstra BLHPMPT Kabupaten Sijunjung periode 2016-2021 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021. Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas PMPTSP untuk tahun 2021 direncanakan sebanyak 6 program sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dari program tersebut diurai melalui sejumlah kegiatan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang telah dibuat oleh organisasi, dengan kata lain program merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah an;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dari Kegiatan tersebut diurai lagi melalui sejumlah Sub kegiatan. Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari Kegiatan yang telah dibuat

oleh organisasi, Sub Kegiatan memiliki Dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan dari Sub kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional Instansi yang berdimensi 5 (lima) tahunan. Sub Kegiatan Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 7 Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 11 Penyediaan peralatan rumah tangga
- 12 Penyediaan bahan logistik kantor
- 13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 14 Fasilitasi Kunjungan tamu
- 15 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 16 Pengadaan Mebel
- 17 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 18 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 19 Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor
- 20 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 21 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya

- 22 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal
- 23 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota
- 24 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota
- 25 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 26 Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal
- 27 Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
- 28 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM
- 29 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM
- 30 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM
- 31 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 diupayakan melalui Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana telah di jelaskan pada Bab sebelumnya. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran organisasi pada tahun 2021. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam 1 tahun.

DPMPTSP dalam menyusun kerangka pendanaan memperhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program pada tahun rencana. Sumber dana pendanaan DPMPTSP di peroleh dari sumber APBD Kabupaten Sijunjung.

Perkiraan Pendanaan tahun 2021 memperhatikan sasaran strategis yang hendak di capai dan besar keluaran masing-masing kegiatan yang di targetkan. Perubahan Rencana kerja dari masing masing Program dan kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten  
 Tahun 2021**

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Keg iatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	2					3	4	5
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						4.534.691.837	4.634.691.837	100.000.000
	<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran ; Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik ; Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>100,100,100,3 8,0</b>	<b>100,100,100,38,0</b>	<b>-</b>	<b>3.439.500.417</b>	<b>3.502.500.417</b>	<b>63.000.000</b>

	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan Evaluasi</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>67.200.550</b>	72.200.550	<b>5.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 Bulan	12 Bulan		<b>59.355.750</b>	64.355.750	5.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 Bulan	12 Bulan		<b>7.844.800</b>	7.844.800	
	<b>Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>2.718.359.187</b>	2.722.414.187	<b>4.055.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kabupaten Sijunjung	23 orang	23 orang		<b>2.660.442.687</b>	2.660.442.687	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan Penata usahaan pengujian/verifikasiSKPD	Kabupaten Sijunjung	12 Bulan	12 Bulan		<b>32.550.200</b>	32.550.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD yang disusun	Kabupaten Sijunjung	18 Dokumen	18 Dokumen		<b>25.366.300</b>	29.421.300	4.055.000
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Terhadap pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>245.182.110</b>	260.138.110	<b>14.956.000</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>100.721.060</b>	100.721.060	-

	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>20.168.000</b>	23.218.000	3.050.000
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>124.293.050</b>	136.199.050	11.906.000
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Terhadap pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>119.490.020</b>	158.479.020	<b>38.989.000</b>
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>10.420.300</b>	15.081.300	4.661.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>5.425.400</b>	8.845.400	3.420.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>16.404.670</b>	46.404.670	30.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>9.450.400</b>	9.450.400	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>9.987.100</b>	10.895.100	908.000
	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>8.389.900</b>	8.389.900	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>59.412.250</b>	59.412.250	

	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Terhadap pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>26.112.800</b>	26.112.800	-
	Pengadaan Mebel						<b>26.112.800</b>	26.112.800	
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Terhadap pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>220.609.500</b>	220.609.500	-
	1). Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>62.296.000</b>	62.296.000	
	2). Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kabupaten Sijunjung	12 bulan	12 bulan		<b>158.313.500</b>	158.313.500	
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>		<b>42.546.250</b>	42.546.250	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Kabupaten Sijunjung	12 Bulan	12 Bulan		<b>25.628.000</b>	25.628.000	
	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kabupaten Sijunjung	13 Bulan	13 Bulan		<b>8.932.250</b>	8.932.250	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Sijunjung	14 Bulan	14 Bulan		-	-	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bimtek	Kabupaten Sijunjung	43 orang	43 orang		7.986.000	7.986.000	
	<b>2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah investor PMDN ; Jumlah investor PMA ; Realisasi investasi PMDN ; Realisasi investasi PMA</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>167 ; 16 ; 8.779.875 ; 190.000 0</b>	<b>154 ; 12 ; 8.779.875 ; 190.000 0</b>	<b>-13,- 4,0,0</b>	<b>75.632.800</b>	<b>85.632.800</b>	<b>10.000.000</b>
	<b>Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah regulasi yang disusun dan disosialisasikan</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>1 produk hukum</b>	<b>1 produk hukum</b>	<b>-</b>	<b>33.998.100</b>	<b>35.998.100</b>	<b>2.000.000</b>
	1). Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi yang disusun, Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Sijunjung	1 dokumen, 100 orang	1 dokumen, 0 orang		<b>33.998.100</b>	35.998.100	2.000.000
	<b>Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Jumlah buku potensi peluang investasi dan WEB GIS Sektor Potensi Investasi	Kabupaten Sijunjung	20 buku potensi	0 buku, 1 web		<b>41.634.700</b>	49.634.700	<b>8.000.000</b>
	1). Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah buku potensi peluang investasi, web gis sektor potensi investasi	Kabupaten Sijunjung	10 buku, 1 web	0 buku, 1 web		<b>41.634.700</b>	49.634.700	8.000.000
	<b>3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah investor PMDN ; Jumlah investor PMA ; Realisasi investasi PMDN ; Realisasi investasi PMA</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>167 ; 16 ; 8.779.875 ; 190.000 0</b>	<b>154 ; 12 ; 8.779.875 ; 190.000 0</b>	<b>-13,- 4,0,0</b>	<b>217.208.620</b>	<b>217.208.620</b>	<b>-</b>

	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah even yang diikuti</b>	<b>NKRI</b>	<b>3 Even</b>	<b>1 Even</b>	<b>- 2 event</b>	217.208.620	217.208.620	-
	1).Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Even yang diikuti, Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	NKRI	3 Pameran, 5 Kali	1 Pameran, 2 Kali	-2 Pameran,- 3kali	217.208.620	217.208.620	-
	<b>4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP	Kabupaten Sijunjung	84, 0	84, 0	-	306.381.400	326.381.400	20.000.000
	<b>Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah jenis pelayanan yang diberikan	Kabupaten Sijunjung	115 Izin dan non izin	115 Izin dan non izin		306.381.400	326.381.400	20.000.000
	1). Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	Kabupaten Sijunjung	1200 Izin dan Non Izin	1200 Izin dan Non Izin	-	234.817.000	254.817.000	20.000.000
	2). Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Laporan	Kabupaten Sijunjung	12 Laporan	12 Laporan	-	2.476.800	2.476.800	-

3). Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Survey IKM	Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen	2 Dokumen	-	69.087.600	69.087.600	-
<b>5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah investor PMDN ; Jumlah investor PMA ; Realisasi investasi PMDN ; Realisasi investasi PMA</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>167; 16; 8.779.875; 190.000 0</b>	<b>154 ; 12 ; 8.779.875 ; 190.000 0</b>	<b>-13,- 4,0,0</b>	<b>431.706.400</b>	431.706.400	-
<b>Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perusahaan Penanaman modal yang dilakukan pengendalian</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>90 perusahaan</b>	<b>90 perusahaan</b>		<b>431.706.400</b>	431.706.400	-
1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	Jumlah Pemantauan Laporan LKPM	Kabupaten Sijunjung	40 Perusahaan	40 Perusahaan		<b>90.037.300</b>	90.037.300	-
2). Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM	Jumlah Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal, Jumlah peserta Bintek dan Sosialisasi	Kabupaten Sijunjung	20 Perusahaan	3 Perusahaan, 182 peserta	-17, 182 peserta	<b>210.922.400</b>	210.922.400	-
3). Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Yang Diawasi	Kabupaten Sijunjung	90 Perusahaan	90 Perusahaan		<b>130.746.700</b>	130.746.700	-
						-	-	

	<b>6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>84, 0</b>	<b>84, 0</b>		<b>64.262.200</b>	71.262.200	<b>7.000.000</b>
	<b>Kegiatan : Pengeloaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah media penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>	<b>2 Media</b>	<b>2 Media</b>		<b>64.262.200</b>	71.262.200	<b>7.000.000</b>
	1 ) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Media	Kabupaten Sijunjung	2 Media	2 Media		<b>64.262.200</b>	71.262.200	7.000.000
							<b>4.534.691.837</b>	<b>4.634.691.837</b>	<b>100.000.000</b>

Muaro Sijunjung, Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL & PTSP  
KABUPATEN SIJUNJUNG

**IAHERLS.Sos.M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP.19730311 199303 1 004**



## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 telah melalui proses sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini. Perencanaan yang merupakan rencana kerja dari Rencana Strategis Periode 2016-2021. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Penanaman Modal dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan diwujudkan melalui beberapa target.

1. Meningkatkan jumlah investor
2. Meningkatkan jumlah nilai realisasi investasi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan
4. Meningkatkan Jumlah Perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( LKPM ) tepat waktu
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia .

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut diatas tidaklah mudah, namun berdasarkan kinerja OPD selama 5 (lima) tahun terakhir dan dengan tekad kerja keras, kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai, apabila para pemangku kepentingan dapat bekerjasama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Kerjasama antar pelaku pembangunan sangat dibutuhkan, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi, dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dibawah wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu penanganan pembangunan sektor Penanaman Modal dan PTSP

mau tidak mau membutuhkan kerjasama dari sektor lain, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya dilapangan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Karena adanya Wabah Covid 19, telah terjadi Refocusing, beberapa Kegiatan mengalami perubahan anggaran yang menyebabkan Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Adanya Perubahan Renja ini diharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung serta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,akurat, transparan dan adil.

Muaro Sijunjung, Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIJUNJUNG

JAHERI,S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730311 199303 1 004